**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGAKUAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAN HAK TANAH ULAYAT PERSUKUAN PETOPANG
KENEGERIAN KUOK DESA BUKIT MELINTANG KECAMATAN KUOK
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017-2019**

Oleh : Tantri Musliana

E-mail : tantrimusliana03@gmail.com

Dosen Pembimbing : Rury Febrina, S.IP, M.Si

E-mail : rury_febrina@yahoo.com

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Writing a thesis entitled "Collaborative Governance in the Recognition of Customary Law Communities and Ulayat Land Rights of the Petopang Kenegerian tribe in Kuok, Bukit Melintang Village, Kuok District, Kampar Regency, 2017-2019", in Kampar Regency, there are actually many units of customary law communities and customary land in every village, especially in Riau Province. In Kampar itself, the existence of customary law communities in Kampar Regency is better known as Kenegerian, where several countries are supervised by the Caliphate. Talking about the existence of customary law communities and their traditional rights have been guaranteed in the 1945 Constitution, however, so far there has not been a comprehensive recognition of customary law communities and customary land rights and has not yet been optimal. There are supporting factors in waste management itself, namely from external and internal factors. This research was conducted in Bukit Melintang Village, Kuok District, Kampar Regency. The purpose of this research is to describe Collaborative Governance in Recognition of Customary Law Communities and Ulayat Land Rights of Petopang Kenegerian Kuok Village, Bukit Melintang, Kuok District, Kampar Regency, 2017-2019. The theory used is the collaboration of Ansel and Gash. The research method used is descriptive qualitative with interview data collection techniques, literature study and documentation, the types of data used are primary data and secondary data. The final result of this research is using a collaborative theory of the implementation of the recognition determination of customary law communities and customary land rights in Kampar Regency, especially in Bukit Melintang Village. This has not been going well according to the theory used. This is due to several factors, such as lack of stakeholder cooperation and undocumented customary forests as a whole.

Keywords: *Collaborative Governance, Customary Law Community, Ulayat Land.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan manusia sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena hampir semua aspek kehidupan terlebih bagi masyarakat Indonesia yang agraris. Tanah tidak hanya berhubungan dengan sumber ekonomi saja. Melainkan beberapa pihak memandang tanah sebagai sesuatu yang sakral dan harus dijaga. Salah satunya adalah masyarakat adat. Mereka memandang tanah khususnya tanah ulayat dikarenakan peninggalan nenek moyang atau disebut sebagai lambang identitas mereka.

Khususnya Hutan adat di Kabupaten Kampar yang sangat luas berupa luas hutan adat di Kabupaten Kampar sampai saat ini ada 9.928,7 Hektar/0,88% dari luas Kampar yang tersebar di berbagai wilayah baik Kampar Kiri, Kampar Kanan, maupun Kampar Hilir. Namun masih banyak masyarakat hukum adat yang belum terdata beserta ulayatnya, walaupun Peraturan Bupati sudah dimiliki namun pendataan masyarakat adat setelah 6 bulan mencari formula, akhirnya berlabuh di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memulai proses pengakuan masyarakat hukum adat. Demikian kata Sekretaris Daerah Kampar, yakni Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar. Selain itu, Kabupaten Kampar sangat potensial untuk dijadikan lokasi pengelolaan sumber daya alam berbasis adat, dimana terdapat potensi.¹

¹ Pemda Kampar Dorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Bahtera alam.org (<https://bahteraalam.org/2018/07/25/pemda-kampar-dorong--pengakuan-masyarakat-hukum-adat/>). Akses 14 Desember 2019

Kenegerian Kuok sendiri luas hutan adatnya merupakan terluas kedua di Kabupaten Kampar setelah kenegerian gajah bertalut yakni 1.872 Ha. Pada zaman dahulu namanya Rona Kobun Bungo, sebagian besar daratan rendah dan lembah-lembah yang timbul sekarang, dulu masih digenangi air. Dengan berjalannya waktu, suasana terus berubah dan penduduk Rona Kobun Bungo semakin banyak dan menempati daerah sekitarnya. Dari kehidupan masyarakat yang turun-temurun, setelah mengalami berbagai peristiwa, maka secara berangsur berubah nama menjadi Negeri Kuok. Negeri Kuok menurut cerita para tetua yakni sebagai berikut : sebagian orang mengatakan bahwa di daerah perairan Rona Kobun Bungo itu dulunya adalah sebatang kayu yang amat besar yang terkenal memiliki kesaktian, kayu itu disebut kayu Kuok. Sebagian lagi orang menceritakan bahwa zaman dahulu tidak jauh di Hulu/Mudik Pasar Kuok sekarang ada sebatang kayu Kuok yang dipasangkan ke Tengkuq kerbau bajak. Oleh karena itu disitulah satu-satunya tempat orang memesan alat bajak (kayu kuok) itu, maka tempat itu menjadi terkenal dengan tempat Kuok.

Persukuan Petopang dahulunya berasal dari asal-usul Datuk Lani simondo orang suku Petopang dengan istrinya Simbua yang membuka lokasi Kampung Sungai Durian atau Bukit Melintang yang pertama kalinya, dengan kampung lama kampung makui yang mana orang tidak pernah mengetahui kampung ini dan beratus-ratus tahun yang lalu. Kampung Lubuak Pudu, jadi disini ule jari sambung lidah datuk Pakomo dulu bergelar datuk Penghulu Mudo, inilah datuk Penghulu Muda yang menguasai tanah ulayat yang diatas dan datuk Penghulu Mudo ini tidak termasuk datuk/mamak yang 20. Penghulu Mudo yang partamo

bernama Sukar yang menunggu Kampung Lamo kemudian datang Ulok setelah itu almarhum Datuak Soral.

Desa Bukit Melintang dalam masyarakat adatnya terdapat empat suku yaitu : Suku Petopang, Melayu yang terbagi atas dua yaitu: Melayu Majo Lelo dan datang Paduko, Suku Domo yang juga terbagi atas dua yaitu: Domo Paduko Tuan, Domo Gindo Bosegh, Suku Piliang dan Suku Chaniago. Yang mana untuk penguasaan tanah ulayatnya merupakan hak suku Petopang untuk yang berada di Desa Bukit Melintang. Dalam kerapatan adat Suku Petopang dipimpin oleh seorang kepala suku bernama datang Pakomo, dengan membawahi tiga datang yang membantu bergulirnya pemerintahan adat di persukuan Petopang, yang mana ketiga datang ini memiliki peran dan tugas masing-masing dalam membantu datang Pakomo seperti halnya dalam mengatur penyelesaian konflik yang ada dipersukuan.²

Respon sangat progresif muncul dari Bupati Kampar atas inisiatif ini, dinyatakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, sehingga keluarlah putusan berupa Keputusan Bupati Nomor : 660LH-IV.2/32 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Registrasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat di Kabupaten Kampar. Tim ini bertugas diantaranya untuk : a) menyusun juknis pelaksanaan pencatatan, identifikasi, verifikasi, dan validasi penetapan MHA, Wilayah Adat dan Hutan Adat; b) melakukan pencatatan terhadap permohonan masyarakat dan hasil identifikasi; c) melakukan identifikasi keberadaan MHA; d) melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan Hutan Adat; dan e) membuat berita acara verifikasi dan

² Profil Desa Bukit Malintang Kenegerian Kuok Kabupaten Kampar

rekomendasi kepada Bupati, terkait penetapan wilayah, masyarakat dan Hutan Adat.³ Selanjutnya, supaya masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan persukuan setempat. Tujuan dibuatnya Perda tanah ulayat tersebut untuk melindungi masyarakat hukum adat, hak komunal, dan lainnya. Sebagaimana diketahui, perda tanah ulayat dan pemanfaatannya, sudah diketuk palu dalam sidang Paripurna DPRD Riau pada tahun 2015. Tetap saja Pergubnya belum juga ada, tapi sebenarnya dalam Ranperda jika sudah diberi nomor surat dan disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri secara umum tetap bisa disosialisasikan, apalagi ini untuk melindungi masyarakat adat.⁴

Masyarakat hukum adat juga akan mengenal adanya sistem pemerintahan dengan peranannya masing-masing, bertindak dalam masyarakat hukum adat sebagai kesatuan untuk keperluan dan atas nama kesatuan tersebut. Masyarakat hukum adat hidupnya bersifat sederhana yang merupakan salah satu corak dari hukum adat itu sendiri. Adapun persukuan/suku yang ada di Kabupaten Kampar yakni ada 6 suku adalah : suku Domo, suku Piliang, suku Melayu, suku Petopang, suku Mandailiang.

Pemangku adat ini memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar

³Terkait pengelolaan masyarakat hukum adat staf kepresidenan puji Pemkab Kampar. Kominfosandi.Kamparkab.go.id.25Juli2018.

(<https://www.google.com/amp/s/kominfosandi.kamparkab.go.id/amp/2018/07/25/terkait-pengelolaan-masyarakat-hukum-adat-staf-kepresidenan-puji-pemkab-kampar/>)

⁴Pergubnya Belum Ada, Perda Tanah Ulayat Riau Perlu Segera Diimplementasikan. Riau.antaranews.com. 21 juni 2016. (<https://riau.antaranews.com/berita/74654/pergubnya-belum-ada-perda-tanah-ulayat-riau-perlu-segera-diimplementasikan>). Akses 14 Desember 2019

Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Hak Tanah Ulayat. Fungsinya untuk membantu pemerintah dalam bidang kemasyarakatan, mengurus dan mengatur urusan dalam hukum adat. Tugasnya menyelenggarakan pemerintahan, kesejahteraan dan keamanan dalam masing-masing persukuan. Sesuai dengan itulah, timbullah inisiatif dari ninik mamak dan anak kemanakan untuk membuat keputusan tentang pengakuan masyarakat adat dan pengakuan hak atas tanah ulayat yang dimiliki oleh persukuan petopang di Desa Bukit Melintang, yang turut didukung dengan adanya program yang diagendakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pada saat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Hutan adat di Desa Bukit Melintang belum ada kejelasan tentang bagaimana cara penggunaannya. Bentuk pengelolaan hutan adat yang dilakukan sebelum ini lebih banyak melibatkan masyarakat adat secara pasif, meskipun masyarakat persukuan petopang telah tinggal didalam hutan adatnya dan juga tinggal disekitar kawasan hutan secara turun-temurun. Inilah yang membuat semakin berkurangnya eksistensi adat didalam pengelolaan sumber daya alam wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat persukuan petopang tersebut.

Maka atas dasar itu, masyarakat adat bersama-sama dengan ninik mamak dan anak kemenakan yang peduli terhadap tanah ulayat tersebut, telah melakukan berbagai upaya yaitu sebagai berikut⁵ :

1. Melakukan pemetaan partisipatif untuk batas hutan adat.

⁵Naskah permohonan penetapan wilayah, masyarakat adat dan hutan adat persukuan Petopang, 29 Agustus 2018

2. Temu masyarakat kenegerian dalam pengelolaan hutan adat secara lestari.
3. Membentuk kelembagaan pengelola hutan adat.
4. Menuliskan sejarah dan aturan adat mengenai pengelolaan sumber daya alam berbasis adat.
5. Komunikasi serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah baik Pusat, Provinsi, dan Kabupaten untuk pengusulan Hutan Adat.

Masyarakat persukuan ini telah menganggap bahwa hutan adat telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah adat, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk menjaga kelestariannya dengan mengelolanya berdasarkan hukum adat yang berlaku yang telah dimusyawarahkan antara ninik mamak dan kepala desa tentang pemeliharaan dan pengelolaan hutan adat nantinya, setelah terbitnya keputusan dari pemerintah pusat/daerah. Tentunya dapat di manfaatkan bagi generasi sekarang maupun untuk anak cucu dimasa yang akan datang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019 ?
2. Apakah Faktor Pendukung dalam Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019 ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dijabarkan diatas maka tujuan

penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019.

Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan secara khusus mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk menyelesaikan S1 untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.
- 2) Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai kerjasama antara Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO), Pemerintah Kabupaten dan pemangku adat persukuan dalam pengakuan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Collaborative Governance

Menurut Wanna, kolaborasi berarti bekerja sama atau bekerja sama dengan pihak lain. Ini berarti para aktor individu, kelompok atau organisasi bekerja sama di beberapa usaha.⁶ Sementara Riley mendefinisikan kolaborasi merupakan relasi dalam bentuk spesifik yang menempatkan relasi organisasi *non-pemerintah* (yang *concern* dalam isu-isu lingkungan dan sumber daya alam) dengan organisasi pemerintah.⁷

Menurut Ansel dan Gash pengertian kolaborasi merupakan sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dan pemangku kepentingan *non-publik* dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau asset publik.⁸

Ansel dan Gash juga berusaha mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai berikut: “*a governing arrangement where one or more publik agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement publik policy or manage publik programs or assets*”.⁹ Menyatakan

⁶Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.25

⁷ Ibid., hlm 26

⁸Purwanti Nurul D, *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, isu-isu Kontemporer*. (Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM: 2016), hlm 175

⁹Ansell, Chris & Alison Gash (2008). “*Collaborative Government in Theory and*

bahwa kolaborasi merupakan suatu upaya untuk membuat aturan yang mengatur dua lembaga atau lebih yang mengurus urusan publik baik langsung maupun tidak langsung. Lembaga tersebut sama-sama mempunyai kepentingan dalam mengatur urusan *non-negara*. Dalam menjalankan kolaborasi, masing-masing pihak harus memiliki keterkaitan secara formal dan memiliki komitmen kuat terhadap apa yang menjadi kesepakatan di awal. Tugas-tugas dipercayakan secara penuh kepada masing-masing pihak dengan tetap melaksanakan koordinasi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program-program yang menyangkut kepentingan publik.

2.2 Konsep Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.¹⁰

Menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat atau persukuan adat memiliki ciri-ciri sebagai berikut¹¹: 1.) Kesatuan manusia yang teratur, 2.) Menetap disuatu daerah tertentu, 3.) Mempunyai penguasa-penguasa, 4.) Mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud.

Ada enam unsur dalam masyarakat hukum adat, yaitu¹² :

1. Ada komunitas manusia merasa bersatu, terikat oleh perasaan kebersamaan keturunan (*geneologis*) dan/atau wilayah (*territorial*).
2. Mendiami wilayah tertentu, dengan batas-batas tertentu menurut konsepsi mereka.
3. Memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan material maupun immaterial.
4. Dipimpin oleh seorang atau beberapa orang sebagai perwakilan kelompok, yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan yang legal/didukung oleh kelompoknya.
5. Memiliki tata nilai sebagai pedoman dalam kehidupan sosial mereka.
6. Tidak ada keinginan dari anggota kelompok itu untuk memisahkan diri.

2.3 Konsep Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Pelaksanaan hak tanah ulayat pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat menurut ketentuan adat setempat. Ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena “sifat” dan “fakta” dari tanah itu sendiri.¹³

Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak para tokoh adat (datuk). Secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada masing-masing suku yang ada. Kebiasaan ini secara turun temurun telah berlangsung sejak lama, sehingga status tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemenakan. Didalamnya juga terkandung berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis, dan

Practice”. *Jurnal of Publik Administration Research and Theory*, 18 (4), p 544

¹⁰HAW. Widjaja, *Pemerintah Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003, hlm. 94

¹¹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2003. hlm. 21-22

¹² Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta: 2011, hlm. 83

¹³Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2003, hlm. 83

keanekaragamannya biota yang tinggi sehingga kelestariannya sangat dijaga oleh masyarakat.¹⁴

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pembangunan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.¹⁵

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bukit Melintang, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Alasan menetapkan Desa Bukit Melintang sebagai lokasi sekaligus sebagai objek penelitian adalah karena Bupati atau Pemerintahan Kampar telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat untuk persukuan petopang khususnya yang ada di masyarakat Desa Bukit Melintang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni :

- a. Wawancara yaitu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden¹⁶. Selanjutnya, wawancara juga dapat diartikan sebagai tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹⁷
- b. Studi kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
- c. Dokumentasi yaitu pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan analisis data dalam penelitian kualitatif, dokumen berupa studi kepustakaan yakni menelusuri, mengumpulkan data, mencatat data tertulis dan keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan-peraturan hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Dengan demikian, sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi, seperti surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, foto dan sebagainya.¹⁹

Sumber Data

- a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut sebagai data asli. Data

¹⁴ Elviridi. *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk Kearifan Tertua Kampar*, (Suska Peress, Pekanbaru, 2007), hlm.82-83

¹⁵ Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA CV

¹⁶ P. Joko Sibagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2011) Hlm. 39.

¹⁷ Husaini Usman & Prunomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014) Hlm. 55.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2002) Hlm. 240.

¹⁹ Ibid, hlm. 124-125

tersebut berupa hasil wawancara mendalam dan analisis data tentang *Collaborative Governance* dalam pengakuan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019.

b. Data Sekunder

Mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang erat hubungannya dengan *Collaborative Governance* dalam Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Data sekunder ini diperoleh dengan studi pustaka dan diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian di lapangan. dan sumber dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat merupakan dua hal yang tidak bisa lepas dari persukuan. Dalam pasal 3 UUPA juga sudah menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya yaitu : “hak ulayat”. Dengan demikian hak ulayat disini menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak) atau bisa disebut dengan hubungan menguasai, bukan hubungan milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah menurut pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Begitu juga halnya dengan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat yang dimiliki Persukuan Petopang Desa Bukit Melintang ini.

***Collaborative Governance* Dalam Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019.**

Gray dalam Ansell dan Gash mendefinisikan tahapan membentuk *collaborative governance* kolaborasi sebagai berikut :²⁰

Dialog tatap muka (*Face to Face Dialog*).

Dialog tatap muka atau *Face to Face Dialog* merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam suatu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadi dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut, untuk membahas suatu kepentingan bersama.²¹ Dialog tatap muka merupakan sebuah cara untuk mencegah kecurigiaan antara aktor dalam membangun sebuah *collaborative* dan mencegah eksplorasi keuntungan bersama ditahap awal sebuah kolaborasi. Dialog tatap muka merupakan proses membangun *trust*, sikap saling menghormati, sikap saling memahami dan komitmen pada proses.²²

Namun Pertemuan tatap muka tersebut hanya dilakukan ketika akan melaksanakan rapat persukuan. Dari situlah dapat dilihat bahwa bahwa tidak ada jadwal yang teratur dalam melakukan tatap muka untuk membahas

²⁰ Abdullah Sabaruddin, *Op. Cit.*, hlm. 31.

²¹ Giant Tri Sambodo, 2016, *Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur Kulonprogo*, DIY. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Vol. 3 No. 1, hal.55.

²² Bagus Nuari Harmawan, *collaborative governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival*. Jurnal E-SOSPOL; Vol. IV Edisi 1;Jan-April 2017, hal.53.

tentang membahas pengajuan penetapan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat, hanya kondisional saja. Padahal, seringkali pertemuan yang dilakukan akan berdampak terhadap *collaborative governance* yang dilakukan. Sebagai mitra kerja, seharusnya tokoh adat harusnya lebih sering mengadakan pertemuan dengan pemerintah desa dan lembaga yang terkait dalam proses penetapan pengajuan masyarakat hukum adat, begitu juga dengan pertemuan terkait hak tanah ulayat. Agar mendapat masukan, solusi dan dukungan yang bisa memperlancar proses tersebut.

Membangun kepercayaan (*Trust Building*).

Membangun kepercayaan atau yang disebut dengan *Trust Building* sangat penting untuk membangun hubungan dan mempertahankan kolaborasi.²³ Dalam penetapan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang, sangat diperlukan kepercayaan baik itu dari Pemerintah Kabupaten Kampar yang memiliki peranan penting dalam proses penetapan masyarakat adat, dikarenakan pihak kabupatenlah yang mengeluarkan keputusan atau legalitas atas hak masyarakat hukum adat, wilayah adat dan hutan adat. Disusul dengan Lembaga Swada Masyarakat yang turut mendampingi langsung setiap penetapan masyarakat hukum adat yang dilalui. Selanjutnya kepercayaan antara pemerintah desa dan ninik mamak serta kaitannya dengan masyarakat harus ada rasa saling percaya satu sama lain agar tercapainya tujuan bersama.

Kuatnya rasa saling percaya dan saling menghormati satu sama lain maka akan mempermudah kerjasama dalam mendelegasikan tugas oleh

masing-masing pihak yang terlibat dalam pengakuan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat. Proses membangun kepercayaan ini memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai *collaborative*. Karena kepercayaan memiliki pola kerja yang luar biasa, karena dengan memberikan kepercayaan kepada seseorang mengajarkan untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan tersebut.

Komitmen dalam proses (*Comitment to proses*).

Komitmen dalam Proses atau disebut *Comitment to Proses* merupakan komitmen atau kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Saling berbagi komitmen berarti mereka saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi permasalahan dan solusi bahwa dalam proses ini merupakan hak milik bersama dan saling terbuka untuk mendapatkan manfaat bersama pula.²⁴

Pada komitmen ini terlihat pada upaya untuk bersedia menerima hasil suatu musyawarah. Di persukuan Petopang Desa Bukit Melintang untuk membangun komitmen bersama Lembaga Swadaya Masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten dan ninik mamak sudah dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pertemuan atau tatap muka yang diadakan terkait pengakuan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat. Selain itu juga di dukung oleh anak kemenakan dan pemerintah desa dalam hal menerima keputusan dari pemerintah kabupaten pada saat melakukan musyawarah, serta tatap muka terkait pengakuan kepunyaan persukuan Petopang.

²³ Abdullah Sabaruddin, *Op. Cit.*, hlm. 29.

²⁴ *Ibid.*,

Saling berbagi pengertian dan pengalaman (*Share Understanding*).

Dalam *collaborative governance* para aktor harus menyamakan pemahaman atau persepsi akan tujuan yang dapat mereka capai secara bersama. Inilah yang dimaksud dengan *share understanding* oleh Ansel dan Gash. *Share understanding* merupakan kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan dalam mengatasi masalah. Dalam proses *collaborative governance*, harus memiliki rasa saling berbagi pengertian dan pengalaman atau bisa dibilang saling berbagi pemahaman bersama untuk mewujudkan tujuan bersama.

Saling berbagi pemahaman dalam proses penetapan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat ini berjalan cukup baik, ini dilihat dari respon ataupun tanggapan positif dari setiap rapat atau musyawarah yang dilaksanakan antara ninik mamak dan *stakeholders* yang terlibat. Begitu juga halnya dengan anak kemenakan yang ada di desa bukit melintang. Tidak ada kendala yang signifikan selama proses berbagi pemahaman ini, tetapi butuh waktu yang cukup lama dalam berbagi pemahaman ini supaya *stakeholder* yang terkait bisa menyamakan tujuan bersama. Karena berbagi pengertian dan pengalaman bersama yang menyangkut visi misi, kesamaan tujuan, ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategis, penyelarasan nilai-nilai inti, dan penyelarasan pada defenisi masalah.

Hasil sementara (*Outcome*).

Hasil sementara atau biasa disebut dengan *Intermediate Outcome* adalah hasil-hasil sementara atas proses yang sedang berlangsung yang memberikan manfaat dan bernilai strategis. Adapun hasil sementara yang dapat dimanfaatkan dari *collaborative governance* antara pihak pemerintah

daerah dengan pihak tokoh adat persukuan Petopang dalam pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak tanah Ulayat Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang adalah sebagai berikut :

- Kesepakatan masyarakat persukuan Petopang untuk menjalankan kewajiban secara bersama-sama mengelola hutan di ulayat Persukuan Petopang.
- Terbitnya regulasi dari Pemerintah Kabupaten yakni Surat Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Tanah Ulayat pada 5 april 2019.

Faktor Pendukung dalam Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Tahun 2017-2019

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pengakuan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- Dukungan dana dari anak kemenakan persukuan petopang.
- Adanya pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat (*non government organization*).
- Pengambilan keputusan dipimpin oleh pemangku adat.

2. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi dalam pengakuan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- Kerjasama yang baik dengan pihak swasta.

- Belum terdokumentasinya hak ulayat secara keseluruhan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Collaborative Governance* dalam pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang Kenegerian Kuok Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok masih ada beberapa kekurangan. Hal ini dapat di lihat dari berbagai hal, yaitu : *Pertama*, dialog tatap muka antara tokoh adat dan *Stakeholders* yang terkait masih belum sering dilaksanakan, tidak ada jadwal yang teratur, kebanyakan hanya kondisional saja. *Kedua*, membangun kepercayaan antara Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pihak Pemerintah Daerah serta ninik mamak dan anak kemenakan membutuhkan waktu yang cukup lama. *Ketiga*, pengambilan keputusan bertitik tumpu pada pemangku adat terkait keinginan untuk penetapan masyarakat adatnya. Dan *keempat*, belum terdokumentasinya hak ulayat secara keseluruhan.
2. Faktor yang mempengaruhi dalam *Collaborative Governance* dalam pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tanah Ulayat Persukuan Petopang ada dua yakni faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal yaitu adanya dukungan dana dari anak kemenakan persukuan, adanya pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat (*NGO*) dan pengambilan keputusan di pimpin oleh pemangku adat dalam pengusulan penetapan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat. Sedangkan faktor internal

dipengaruhi oleh adanya kerjasama yang baik dengan pihak swasta dan belum terdokumentasinya hak ulayat secara keseluruhan di Kabupaten Kampar.

Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi ninik mamak dan *stakeholders* lainnya, serta bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Lembaga Adat
Agar lebih meningkatkan pembentukan wadah untuk komunikasi dalam *collaborative* dalam penetapan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat perlu dilaksanakan secara rutin, meningkatkan pemahaman serta wawasan masyarakat persukuan sekitar.
2. Bagi Pemerintah
Pemerintah harus meningkatkan program atau penfokusan program untuk OPD-OPD terkait dalam penetapan masyarakat hukum adat dan hak tanah ulayat yang ada diseluruh kawasan Kabupaten Kampar.

DAFTAR PUSTAKA

- Elviriadi. 2007. *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul Mereguk Kearifan Tertua Kampar*, Pekanbaru: Suska Perss.
- Muhammad, Bushar. 2003. *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nurul D, Purwanti. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: Center for Policy &

Management Studies, FISIPOL UGM.

Rato, Dominikus. 2011. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Sabaruddin, Abdul. 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sibagy, Joko P. 2011. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV.

Usman, Husaini & Akbar, Prunomo Setiady. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintah Desa/Marga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wulansari, Dewi. 2003. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

Ansell, Chris & Alison Gash. 2008. *Collaborative Government in Theory and Practice*". *Jurnal of Publik Administration Research and Theory*.

Bagus Nuari Harmawan. 2017. *collaborative governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival*. *Jurnal E-SOSPOL*; Vol. IV Edisi 1;Jan-April.

Giant Tri Sambodo, 2016, *Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur Kulonprogo, DIY*. *Jurnal Ilmu*

Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Vol. 3 No. 1.

Akses Internet

Pemerintah Daerah Kampar Dorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Bahtera alam.org. Akses 14 Desember 2019.

(<https://bahteraalam.org/2018/07/25/pemda-kampar-dorong--pengakuan-masyarakat-hukum-adat/>).

Pergubnya Belum Ada, Perda Tanah Ulayat Riau Perlu Segera Diimplementasikan.

Riau.antaraneews.com. 21 juni 2016. Akses 14 Desember 2019.

(<https://riau.antaraneews.com/berita/74654/pergubnya-belum-ada-perda-tanah-ulayat-riau-perlu-segera-diimplementasikan>)

Terkait pengelolaan masyarakat hukum adat staf kepresidenan puji Pemkab Kampar.

Kominfosandi.Kamparkab.go.id. 25 Juli 2018.

(<https://www.google.com/amp/s/kominfosandi.kamparkab.go.id/amp/2018/07/25/terkait-pengelolaan-masyarakat-hukum-adat-staf-kepresidenan-puji-pemkab-kampar/>).